

TAHUN

2019



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Telp. (0274) 562811 psw 1112

Website: <http://bpkadiy.jogjaprov.go.id>

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 7 Februari 2020  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. Bambang Wisnu Handoyo  
NIP. 19601003 198803 1 006

# Ikhtisar Eksekutif

---

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah”:
  - Diukur dengan indikator Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (kualitatif kumulatif dari meningkatnya PAD, APBD tepat dan akurat, laporan keuangan yang akuntabel, penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) program, yakni Program Peningkatan Pendapatan Daerah, Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Program Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Pendapatan KPPD dan Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar 100%, target tercapai (target maksimal 100%)
2. Capaian sasaran 2 “Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY”:
  - Diukur dengan indikator nilai Proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah (nilai rupiah proyeksi aset pengelola barang milik daerah)
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar Rp6.704.805.116,00; sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 terealisasi Rp 7.107.452.565,00 Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 114%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar Rp6.505.543.500,00,00 terjadi peningkatan sebanyak Rp601.909.065,00 (9,25%)

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Implementasi *Performance Based Organization* terus memerlukan pendampingan dan evaluasi, termasuk merespon kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi;
2. Era industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan internet untuk segala hal dan kecerdasan buatan di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik menuntut pemerintah bergerak serba cepat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.4 Isu-isu Strategis .....	14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	15
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018 .....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019.....	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	24
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019.....	39
3.3. Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV PENUTUP.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	43

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019.....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2017-2022.....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2019.....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	22
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	24
Tabel III.3.1 Pengukuran Capaian Sasaran 1.....	28
Tabel III.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1.....	28
Tabel III.3.3 PAD Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	29
Tabel III.3.4 Inovasi Layanan Publik di Kabupaten/Kota.....	29
Tabel III.3.5 Penetapan APBD.....	29
Tabel III.3.6 Program kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD.....	30
Tabel III.3.7 Kesesuaian dan ketepatan waktu laporan keuangan Pemda DIY.....	31
Tabel III.3.8 Opini BPK RI dalam 5 tahun terakhir.....	33
Tabel III.3.9 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2019.....	34
Tabel III.3.10 Evaluasi APBD, pembinaan dan optimalisasi BUMD.....	35
Tabel III.3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	36
Tabel III.3.12 Pengukuran Capaian Sasaran 2.....	37
Tabel III.3.13 Target dan Reliasasi Sasaran 2.....	37
Tabel III.3.14 Nilai Proyeksi optimalisasi aset.....	37
Tabel III.3.15 Anggaran dan Realisasi Anggaran.....	40

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Pengelola Keuangan dan Aset DIY .....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Pengelola Pengelola Keuangan dan Aset DIY.....	25
Gambar II.1 Aplikasi sengguh.jogjaprovo.go.id.....	20
Gambar III.1 Penghargaan yang diterima.....	30
Gambar III.2 Dokumen RAPBD dan Sosialisasi Penyusunan APBD.....	31
Gambar III.3 Penyerahan Opini BPK RI.....	33
Gambar III.4 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan 2019.....	35
Gambar III.5 Evaluasi APBD dan Motivasi BUMD dan BUKP.....	36
Gambar III.6 Optimalisasi Aset Daerah 2019.....	38

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

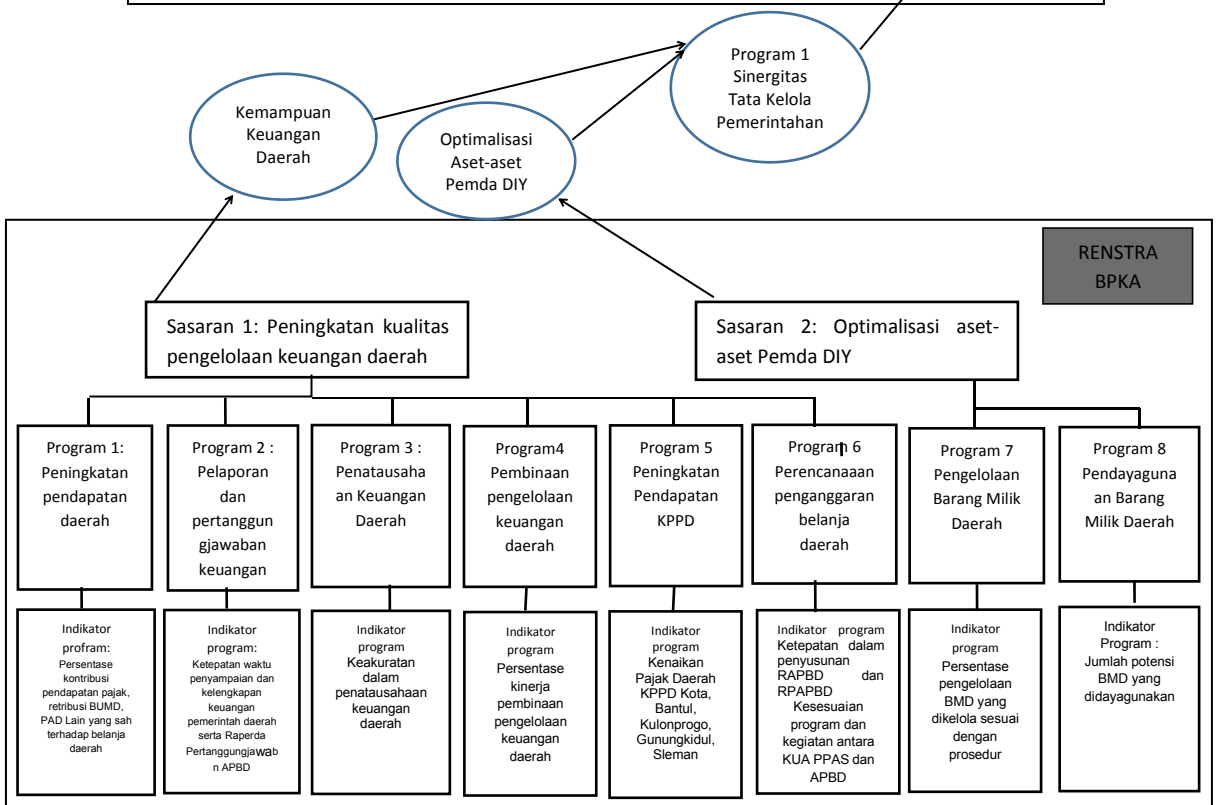
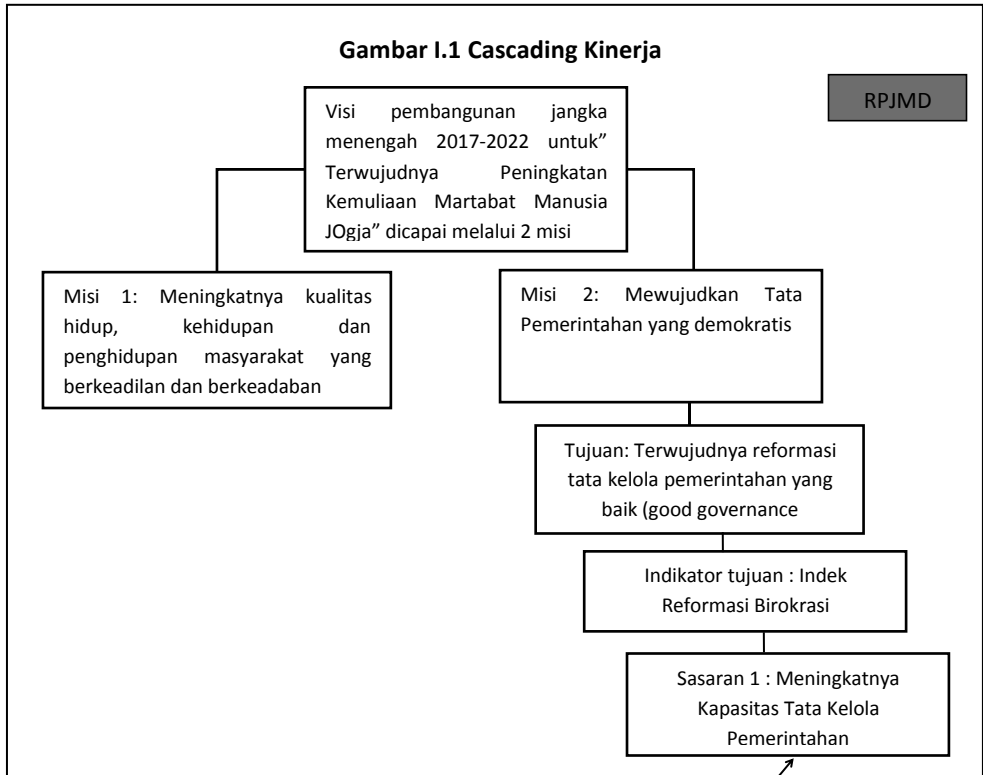
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



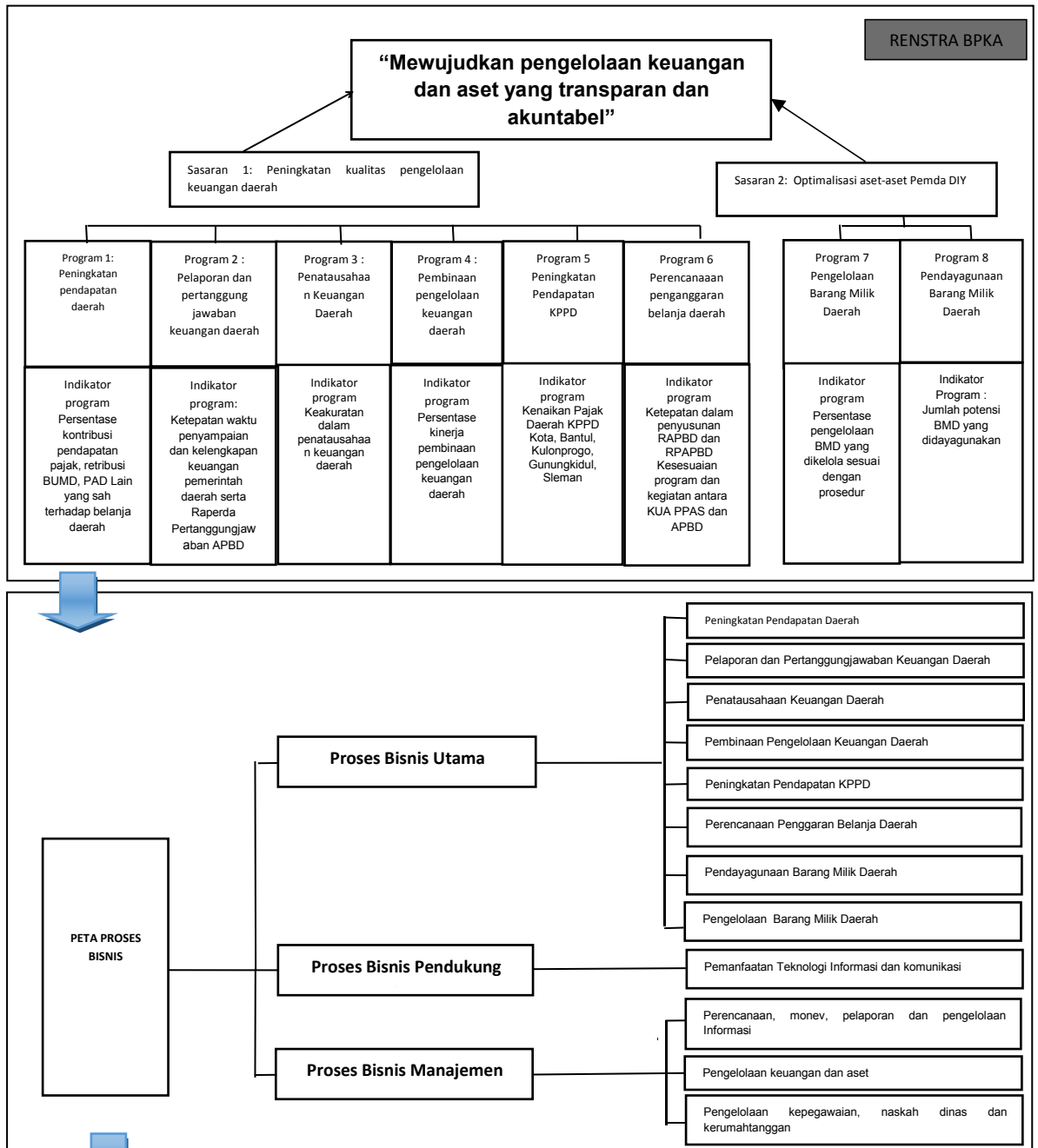
**Gambar I.1 Cascading Kinerja**

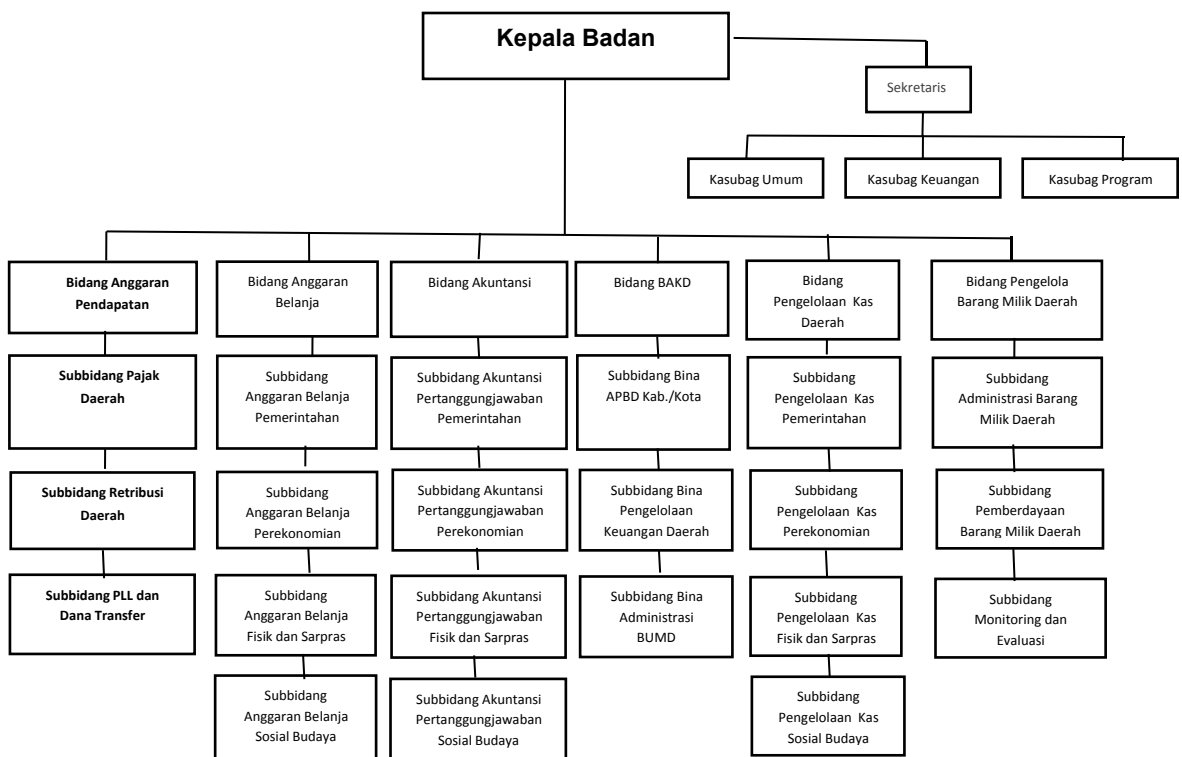


## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY**





Sumber: Lampiran Pergub DIY No. 76 Tahun 2018

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPKA DIY**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kabupaten/kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi ;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<p>1. Kepala Badan</p> <p>2. Sekretaris:</p> <p>1) Kasubbag Umum</p> <p>2) Kasubag Program dan data TI</p> <p>3) Kasubag Keuangan</p> <p>3. Kabidang Anggaran Pendapatan:</p> <p>1) Kasubbid Pajak</p> <p>2) Kasubbid Retribusi</p> <p>3) Kasubbid Pendapatan Lain-lain</p> <p>4. Kabid Anggaran Belanja:</p> <p>1) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Pemerintahan</p> <p>2) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Perekonomian</p> <p>3) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Sarpras</p> <p>4) Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Sosial Budaya</p> <p>5. Kabid Akuntansi:</p> <p>1) Kasubbid Akuntansi Sektor Pemerintahan</p> <p>2) Kasubbid Akuntansi Sektor Perekonomian</p> <p>3) Kasubbid Akuntansi Sektor Sarpras</p> <p>4) Kasubbid Akuntansi Sektor Sosial Budaya</p>	<p>1. Dibawah Kasubbag Umum:</p> <p>1) Analis Kepegawaian.</p> <p>2) Pengelola Barang Milik Negara;</p> <p>3) Pengelola Gaji;</p> <p>4) Pengadministrasi Keuangan;</p> <p>5) Pengadministrasi Kepegawaian;</p> <p>6) Pengadministrasi Persuratan;</p> <p>7) Pranata Kearsipan;</p> <p>8) Pengemudi</p> <p>2. Dibawah Kasubbag Keuangan:</p> <p>1) Analis pelaporan keuangan</p> <p>3. Dibawah Kasubbag Program dan Data TI</p> <p>1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>4. Dibawah Kasubbid Pajak:</p> <p>1) Analis Pajak</p> <p>5. Dibawah Kasubid Retribusi:</p> <p>1) Analis Retribusi Daerah</p> <p>6. Dibawah Kasubid Pendapatan Lain-Lain:</p> <p>1) Analis Pendapatan Lain-lain</p> <p>7. Dibawah Kasubbid Anggaran Belanja Sektor Pemerintahan</p> <p>1) Pengadministrasi umum</p> <p>2) Analis Perencanaan Anggaran</p> <p>8. Dibawah Kasubid Anggaran Belanja Sektor Perekonomian</p> <p>1) Pengadministrasi umum</p> <p>2) Analis Perencanaan Anggaran</p> <p>9. Dibawah Kasubid Anggaran Belanja Sektor Fisik dan Sarpras</p> <p>1) Pengadministrasi umum</p> <p>2) Analis Perencanaan Anggaran</p> <p>10. Dibawah Kasubid Anggaran Belanja Sektor Sosial Budaya</p> <p>1) Pengadministrasi umum</p> <p>2) Analis Perencanaan Anggaran</p> <p>11. Dibawah Kasubid Akuntansi Sektor Pemerintahan</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Penyusun laporan subidang pemerintahan</p> <p>12. Dibawah Kasubbid Akuntansi Sektor Perekonomian</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Penyusun laporan subidang perekonomian</p> <p>13. Dibawah Kasubbid Akuntansi Sektor Fisik dan Sarpras</p> <p>3) Pengadministrasi Umum</p> <p>14. Dibawah Kasubbid Akuntansi Sektor Sosial Budaya</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Penyusun laporan subidang Sosbud</p> <p>4) Penyusun laporan subidang Fisik Sarpras</p>

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<p>6. Kabid Pengelolaan Kas Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Pemerintahan</li> <li>2) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Perekonomian</li> <li>3) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Sarpras</li> <li>4) Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Sosial Budaya</li> </ol> <p>7. Kabid Bina Adminstrasi Keuangan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubbid Bina APBD Kab/Kota</li> <li>2) Kasubbid Bina Keuangan Daerah</li> <li>3) Kasubbid Bina BUMD dan BUKP</li> </ol> <p>8. Kabid Pengelolaan Barang Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubbid Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>2) Kasubbid Pendayagunaan Barang Milik Daerah</li> <li>3) Kasubbid Minotoring dan Evaluasi</li> </ol> <p>9. Kepala UPTD;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubbag Tata Usaha</li> <li>2) Kasi Penagihan dan Pendataan</li> <li>3) Kasi Pembukuan dan Pelaporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Pemerintahah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Umum</li> <li>2) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</li> </ol> </li> <li>16. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Perekonomian <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</li> </ol> </li> <li>17. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Fisik dan Sarpras <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</li> </ol> </li> <li>18. Kasubbid Pengelolaan Kas Sektor Sosial Budaya <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola perbendaharaan dan pelayanan</li> </ol> </li> <li>19. Dibawah Kasubbid Bina APBD Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Umum</li> <li>2) Analis pengelola keuangan</li> </ol> </li> <li>20. Dibawah Kasubbid Bina Keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis pengelola keuangan</li> </ol> </li> <li>21. Dibawah Kasubbid Bina BUMD dan BUKP <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengevaluasi Perkembangan BUMD</li> </ol> </li> <li>22. Dibawah Kasubbid Pengelolaan Barang Milik Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Umum</li> <li>2) Analis Pengelola Kekayaan Daerah</li> </ol> </li> <li>23. Dibawah Kasubbid Pendayagunaan Barang Milik Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Pengelola Kekayaan Daerah</li> </ol> </li> <li>24. Dibawah Kasubbid Minotoring dan Evaluasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Pengelola Kekayaan Daerah</li> </ol> </li> <li>25. Dibawah kasubag TU KPPD <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Persuratan</li> <li>2) Pranata Kearsipan</li> <li>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</li> <li>4) Pengadministrasi Kepagawain</li> <li>5) Pengelola BMD</li> <li>6) Bendahara</li> <li>7) Pengadministrasi Keuangan</li> <li>8) Pengelola Gaji</li> <li>9) Pengelola Akuntansi</li> <li>10) Verifikator Data Laporan Keuangan</li> <li>11) Teknisi Sarpras</li> <li>12) Pengemudi</li> </ol> </li> <li>26. Dibawah Kasi Penagihan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi</li> <li>2) Verifikator Pajak</li> <li>3) Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan</li> <li>4) Pengadministrasi Pajak</li> <li>5) Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah</li> </ol> </li> <li>27. Dibawah Kasi pembukuan dan Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Penagihan dan Pengawasan</li> </ol> </li> </ol>

#### **1.4 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk “mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”, antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.  
Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan.  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dimanfaatkan untuk pembangunan dirasakan oleh masyarakat.
3. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas  
Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

#### **1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1.	Kepala Badan	1	S2/ S1	1	S1 = 1	1	-
2.	Kepala Bidang	6	S2/ S1	5	S1= 3, S2 = 2	2	3
3.	Sekretaris	1	S2/ S1	1	S2 = 1	-	1
4.	Kepala UPTD	5	S1	5	S2 = 5	1	4
4.	Kepala Seksi/Subbagian	40	S1	24	D3=2, S1=25, S2=9	12	12
B.	Jabatan Pelaksana	370	SLTA, D3/D4, S1	208	SLTP=3, SLTA=33, D3/D4=9, S1=36, S2=123	132	76
	Jumlah	423		244		148	96

*Sumber: Data Kepegawaian BPKA DIY Desember 2019 (diolah)*

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 119 orang (48,77%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 32 orang (13,14%), Diploma 14 orang (5,73%), SLTA 72orang (29,50%) dan SLTP 7 orang (2,86%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 179 orang, terdiri dari 6 orang pejabat Struktural, 3 pejabat pelaksana substantif dan 170 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan struktural, 24 pejabat pelaksana substantif, 34.orang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana administratif. Terdapat 1 unit kerja eselon III yakni Bidang Pengelolaan Kas Daerah terjadi kekosongan pejabat eselon III dan 5 eselon IV tetapi tidak didukung petugas akuntansi dan pengadministrasi umum sesuai kualifikasi. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagai pengelola anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta penyiap bahan perumusan kebijakan akuntansi dan pengelolaan barang daerah.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah dan bangunan	100 unit	211.901.016.509,-
2	Alat-alat Angkutan	59 unit	5.808.706.442,-
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	11.154 unit	60.666.024.554,-
4	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	804 unit	5.682.132.528,-
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	2.463 buku	214.604.190,-
2	Barang bercorak Kebudayaan	2 unit	84.395.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>234.017.192.964,-</b>

\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2018

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 4 (empat) unit kendaraan dinas jabatan, 9 (sembilan) unit kendaraan operasional, dan 24 (dua puluh empat) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca/perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2018	Rp. 89.963.980.325,00	Rp. 53.836.091.275,00	143.779.991.600,00
2019	Rp. 102.932.963.264,00	Rp. 52.220.139.867,00	Rp155.142.002.031,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY berasal dari APBD DIY dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2018 terdapat kenaikan anggaran belanja tidak langsung yang cukup signifikan sebesar Rp. 1.331.462.246,- karena mengakomodir gaji CPNS Pemda DIY, sedang belanja langsung turun Rp1.616.032.278,-, meskipun demikian tidak menjadi kendala untuk membiayai program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.



## 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01335, tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dengan Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="253 517 717 678">1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai</li><li data-bbox="253 710 717 838">2. Berupaya meningkatkan kinerja khususnya pada aspek evaluasi internal dan aspek pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi.</li></ol>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="742 517 1204 710">1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk pertemuan Senin pagi maupun pembinaan rutin kepegawaian yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali;</li><li data-bbox="742 710 1204 902">2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan menyusun aplikasi capaian kinerja.</li></ol>

# BAB 2

## Perencanaan

## dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*). Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY didesain paralel (*inline*) dengan alur (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, dan program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun adalah :

**“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”**

Adapun sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY  
Tahun 2017-2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	n/a	100	100	100	100	100	100
2.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	n/a	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penigkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perbaikan manajemen terhadap semua proses bisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggali dan mengtimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber pendapatan daerah</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sdm pengelola pendapatan</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan</li> <li>4. Meningkatkan sarpras yang mendukung peningkatan pendapatan</li> <li>5. Peningkatan dan inovasi pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat/wajib pajak</li> </ol>
2.	Optimalisasi asset-aset Pemda DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk diperoleh asset idle</li> <li>2. Mengevaluasi atas pelaksanaan road map pemanfaatan BMD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme maupun produktifitas SDM pengelola barang di Pemda DIY</li> <li>2. Meningkatkan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai kontributor peningkatan pendapatan</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyusunan SOP pengelolaan barang milik daerah</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Monev dan pendampingan atas pengelolaan BMD pada satuan kerja perangkat daerah</li> </ol>

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. Program Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	<b>2.095.344.000,00</b>
	1.1.1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	1.529.290.000,00
	1.1.2. Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	566.054.000,00
	1.2. Program Penatausahaan Keuangan Daerah	<b>872.945.000,00</b>
	1.2.1. Pengendalian Belanja Langsung	642.190.500,00
	1.2.2. Pengendalian Belanja Tidak Langsung	230.754.500,00
	1.3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>2.005.146.500,00</b>
	1.3.1. Evaluasi APBD Kab/Kota	142.455.000,00
	1.3.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.035.690.000,00
	1.3.3. Pembinaan BUKP dan BUMD	827.001.500,00
	1.4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah	<b>3.371.473.000,00</b>
	1.4.1. Perencanaan Pendapatan Daerah	195.719.000,00
	1.4.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah	3.175.754.000,00
	1.5. Proram Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	4.167.764.000,00
	1.6. Program Peningkatan Pendapatan KPPD	10.035.555.520,00
	1.6.1. Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kota Yogyakarta	1.768.292.660,00
	1.6.2. Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	420.750.000,00
1.6.3. Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kabupaten Bantul	1.545.679.680,00	
1.6.4. Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	406.450.000,00	

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	1.6.5 Pelayanan Kesamsatan KPPD di Kabupaten Gunungkidul	1.197.454.560,00
	1.6.6 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Gunungkidul	388.738.000,00
	1.6.7 Pelayanan Kesamsatan KPPD Kulonprogo	1.196.782.620,00
	1.6.8 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang KPPD Kulonprogo	359.685.000,00
	1.6.9 Pelayanan Kesamsatan KPPD Sleman	2.156.075.000,00
	1.6.10 Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Sleman	595.648.000,00
	1.7 Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	4.167.764.000,00
	1 7 1 Penyusunan APBD	3.277.008.000,00
	1 7 2 Penyusunan Perubahan APBD	890.756.000,00
		<b>Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1</b>
2.Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	2.1. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	<b>1.867.325.000,00</b>
	2.1.1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah	453.939.750,00
	2.1.2 Penilaian Barang Milik Daerah	1.279.035.000,00
	2.2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>3.118.195.607,00</b>
	2.2.1. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	493.281.000,00
	2.2.2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	331.732.000,00
	2.2.3. Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2.293.182.607,00
		<b>Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2</b>
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>27.399.398.377,00</b>

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	10.539.512.970,00
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.750.914.860,00
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.560.112.110,00
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.228.486.000,00
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.852.546.520,00
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4.016.220.000,00
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	5.856.547.000,00
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.273.832.020,00

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.826.447.500,00
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	879.500.000,00
3..	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	428.682.000,00
	3 1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.979.500,00
	3.2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	26.995.000,00
	3.3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	366.152.500,00
	3.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	25.555.000,00
	Total Anggaran Pendukung	24.820.741.490,00

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

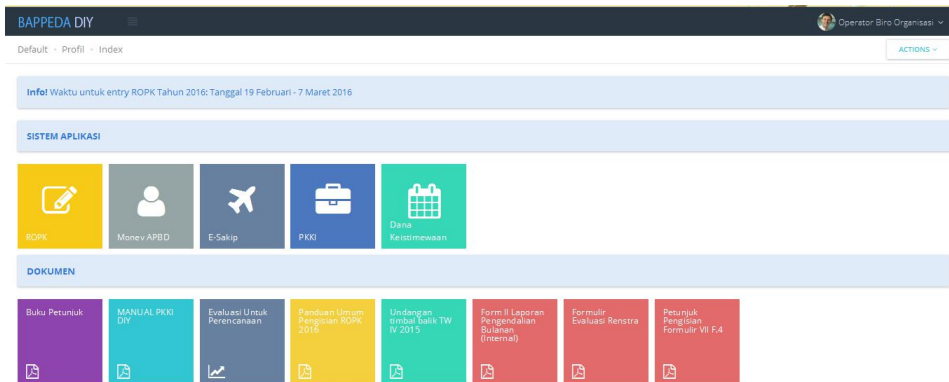
**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	I	17,00
					II	50,00
					III	72,00
					IV	100,00
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	6.234.617.858,-	I	187.038.535,00
					II	3.740.770.716,00
					III	4.987.694.287,00
					IV	6.234.617.858,83

#### 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sungguh.jogjaprovo.go.id* dengan konsep penilaian menggunakan Balance Score Card (BSC) yang telah disesuaikan. Penilaian terhadap kinerja OPD meliputi kinerja fisik, penilaian kinerja

keuangan , penilaian ketercapaian sasaran kinerja dan ditambah dengan pengukuran kapasitas kinerja organisasi.



**Gambar II.1. Aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id**

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2019
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran
5. Inovasi

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indikator: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Meta Indikator: Meningkatnya PAD (20%)	%	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/MET A INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		APBD yang tepat dan akurat (20) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)								
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	<u>Indikator:</u> Optimalisasi aset aset pengelola barang milik daerah  <u>Meta Indikator:</u> Nilai proyeksi aset pengelola	rupiah	n/a	6.505.543.500	6.234.617.858	7.107.452.565	114,00	Sangat Baik	6.967.568.518

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<u>Indikator:</u> Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	<u>Meta Indikator:</u> Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, merupakan penghitungan kualitatif akumulatif dari 5 (lima) sub meta indikator dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \sum PAD + \sum APBD + \sum LKD + \sum KAD + \sum PKD$$

**Keterangan:**

- TA = Laporan keuangan transparan dan akuntabel  
 $\sum PAD$  = sub meta indikator meningkatnya PAD  
 $\sum APBD$  = sub meta indikator APBD yang tepat waktu dan akurat  
 $\sum LKD$  = sub meta indikator laporan keuangan akuntabel  
 $\sum KAD$  = sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat  
 $\sum PKD$  = sub meta indikator pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

Penghitungan masing-masing sub meta indikator sebagai berikut:

1. Sub meta indikator meningkatnya PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (n) dengan realisasi PAD Tahun sebelumnya (n-1), diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum PAD = PAD(n) - PAD(n-1)$$

**Keterangan:**

- $\sum PAD$  = meningkatnya PAD  
PAD(n) = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019  
PAD (n-1) = realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018

2. Sub meta indikator APBD tepat dan akurat diukur melalui 2 komponen yaitu APBD yang tepat dengan melihat bukti dalam dokumen RAPBD TA.2020 disampaikan kepada DPRD DIY tanggal 10 September 2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2020 yaitu APBD disusun paling lambat minggu kedua bulan September, sedangkan APBD yang akurat dapat dilihat dari konsistensi antara program dan kegiatan dalam KUA PPAS 2020 dan penghantaran RAPBD TA 2020, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum APBD = (AB + BD)/2$$

**Keterangan**

- $\sum APBD$  = APBD tepat dan akurat  
AB = APBD tepat (waktu) = 100%  
BD = APBD akurat = 85%(P2/P1) x 100% + 15% (K2/K1) x 100%  
P1 = program sesuai KUA PPAS  
P2 = program sesuai RAPBD  
K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS  
K2 = kegiatan sesuai RAPBD

3. Sub meta indikator laporan keuangan daerah yang akuntabel diukur dengan melihat kelengkapan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai PP.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri 13 tahun 2006 agar dapat dilakukan audit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum LKD = LK1(\text{sesuai}) + KD2(\text{tepat waktu})$$

**Keterangan**

- $\sum LKD$  = laporan keuangan daerah akuntabel  
 LK1 = laporan keuangan sesuai Standar SAP (60%)  
 KD2 = laporan keuangan dan pertanggungjawaban tepat waktu ( 40%)

4. Sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat dihitung dengan cara membandingkan jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dengan jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum KAD = \frac{\sum SP2D}{\sum SPM} \times 100\%$$

**Keterangan**

- $\sum KAD$  = penatausahaan keuangan yang akurat  
 $\sum SP2D$  = jumlah SP2D yang diterbitkan  
 $\sum SPM$  = jumlah SPM yang di terima

5. Sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur melalui ketepatan, keakuratan dan konsistensi pengelolaan keuangan daerah pada evaluasi APBD Kab/Kota, pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan dan prosedur, serta mengoptimalkan kinerja BUMD dan BUKP, dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PKD = \sum EAP + \sum EAK + \sum EAD$$

**Keterangan**

- PKD = pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten  
 $\sum EAP$  = evaluasi APBD Kab/Kota  
 $\sum EAK$  = pengelolaan keuangan sesuai prosedur  
 $\sum EAD$  = realisasi deviden

Hasil penghitungan kualitatif kumulatif dari 5 (lima) sub meta indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

**Tabel III.3.1** Pengukuran Capaian Sasaran 1

NO	Sub meta indikator	Hasil Sub indikator	Bobot
1	2	3	4
1	Sub meta indikator meningkatnya PAD ( $\Sigma$ PAD)	25.284.785.703,06 (1,22%)	20%
2	Sub meta indikator APBD tepat dan akurat ( $\Sigma$ APBD)	100%	20%
3	Sub meta indikator laporan keuangan daerah yang akuntabel ( $\Sigma$ LKD)	100%	20%
4	Sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat ( $\Sigma$ KAD)	100%	20%
5	Sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten ( $\Sigma$ PKD)	100%	20%
<b>Jumlah (TA)</b>			<b>100%</b>

Kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.3.2** Target dan realisasi kinerja sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2018	Tahun 2019			Target akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100	100%	100%

#### 3.1.1.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel III.3.3** Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun		Ket.
		2018	2019	
1	2	3	4	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.040.723.348.530,93	2.066.008.134.233,99	
4.1.1	Pajak Daerah	1.717.291.718.438,00	1.757.499.739.372	
4.1.2	Retribusi Daerah	43.625.223.035,16	41.914.549.201,08	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.097.737.606,37	85.940.095.937,15	
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	194.708.669.451,00	180.653.749.723,76	
	<b>Jumlah</b>	2.040.723.348.530,93	2.066.008.134.233,99	

*Sumber : Laporan Keuangan un audited 2019 ( data diolah)*

Penghitungan data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\sum \text{PAD} &= \text{PAD}(n) - \text{PAD}(n-1) \\ &= 2.066.008.134.233 - 2.040.723.348.530,93 \\ &= 25.284.785.703,06\end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan di atas maka terdapat kenaikan PAD pada tahun 2019 sebesar 25.284.785.703,06 (1,22%) dari tahun sebelumnya (2018), dengan demikian capaian sub meta indikator meningkatnya PAD bobot 20% tercapai.

Agar pendapatan asli daerah selalu meningkat upaya yang dilakukan antara lain mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, penambahan lokasi layanan baru Samsat Desa di Wukirsari, Imogiri Bantul dan pengembangan inovasi pelayanan.

**Tabel III.3.4 Inovasi Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota**

No	KPPD	Nama Inovasi	Lokasi
1	2	3	4
1.	KPPD DIY di Kota Yogyakarta	Layanan GOJAK	Kelurahan se Kota
2.	KPPD DIY di Bantul	Layanan TEMARAM	Samsat Pembantu Sewon
3.	KPPD DIY di Kulonprogo	Layanan SI JEBOL	Desa se Kulonprogo
4.	KPPD DIY di Gunungkidul	Layanan BAJAK SAWAH	Toserba Sambipitu, Pathuk
5.	KPPD DIY DI Sleman	Layanan TEBAR SALAM	Samsat Pembantu Maguwoharjo
		Layanan NIGHT DRIVE THRU	Samsat Induk Sleman

*Sumber: BPKA DIY 2019, data diolah*

Atas upaya perbaikan pelayanan dan pengembangan inovasi dalam pelayanan publik telah di apresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan penanugerahan penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang diterima oleh KPPD Sleman sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik Tahun 2019.



**Gambar III. 1. Penghargaan yang diterima.**

### 3.1.1.2. Data Dukung Capaian APBD tepat dan akurat .

RAPBD TA 2020 disampaikan ke DPRD dan ditetapkan tepat waktu sesuai pedoman penyusunan APBD TA 2020 dan program dan kegiatannya pada RAPBD konsisten dengan KUA dan PPAS TA 2020, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel III.3.5** Penetapan APBD

Uraian	Tanggal		Keterangan
	Penghantaran	Penetapan	
APBD 2020	10 September 2019	27 Desember 2019	tepat = 100%
PAPBD 2019	1 Agustus 2019	2 September 2019	

*Sumber : BPKA DIY, 2019, data diolah*

**Tabel III.3.6** Program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
KUA PPAS	332	950	akurat = 100%
RAPBD	322	950	

*Sumber : website Bappeda DIY, tahun 2019, data diolah*

Akumulasi penghitungan data dalam kedua tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Sigma \text{APBD} &= (AB + BD) / 2 \\ &= (100\% + ((85\% (322/322) \times 100\%) + (15\% (950/950) \times 100\%))) / 2 \\ &= (100\% + 85\% + 15\%) / 2 \\ &= 100\% = 20\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat tercapai 100% sehingga bobot 20% terpenuhi.

Upaya yang dilakukan agar penyusunan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu sesuai pedoman penyusunan APBD dan akurat dengan indikator konsistensi antara program dan kegiatan dalam KUA dan PPAAS dengan RAPBD yang dihantarkan antara lain melalui sosialisasi pedoman penyusunan APBD TA 2020.



Gambar: III.2 Dokumen RAPBD dan Sosialisasi Penyusunan APBD

### 3.1.1.3. Data Dukung Capaian laporan keuangan daerah yang akuntabel

Adapun data penyusunan laporan keuangan Pemda DIY sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel III.3.7** Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Unsur SAP (PP.71/2010) (L1)					
	1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-			Sesuai
	2) Neraca	v	-			
	3) Laporan Operasional (LO)	v	-			
	4) Laporan perubahan ekuitas (LPE)	v				

1	2	3	4	5	6	7
	5) Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	v	-			
	6) Laporan Arus Kas (LAK)	v	-			
<b>Nilai (L1)</b>						<b>60%</b>
2	Penyusunan Laporan Keuangan (Permendagri 13/2006) ( K2)					
	1) Laporan Keuangan Pemda DIY			Maret 2020	-	Tepat
<b>Nilai (K2)</b>						<b>40%</b>

Sumber : LHP BPK RI Tahun 2018, data diolah

Penghitungan sesuai data di atas, hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum \text{LKD} &= \text{LK1 (sesuai)} + \text{KD2 (tepat)} \\
 &= 60\% + 40\% \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

Pada akhir periode APBD, Kepala BPKA DIY selaku SKPKD dan SKPD harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan SKPD selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mengacu pada PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah, sejak tahun 2015 Pemerintah Daerah harus menerapkan SAP berbasis akrual.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan Pemda DIY Tahun 2019 un audited selesai disusun pada tanggal 31 Januari 2020, dilakukan reviu oleh Inspektorat DIY dan disampaikan BPK RI paling lambat bulan Maret 2020.

Atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

**Tabel III.3.8** Opini BPK RI dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Opini	Keterangan
1	2	3
2014	WTP	Tanpa paragraf penjelasan
2015	WTP	Tanpa paragraf penjelasan
2016	WTP	Tanpa paragraf penjelasan
2017	WTP	Tanpa paragraf penjelasan
2018	WTP	Tanpa paragraf penjelasan

Sumber : BPK RI, Tahun 2019 ( data diolah )

Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2018 disampaikan pada saat pembacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY TA.2018 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY tanggal 28 Mei 2019.



**Gambar III. 3.** Penyerahan Opini BPK RI.

#### 3.1.1.4. Data Dukung Capaian penatausahaan keuangan yang akurat

Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dan dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah selama tahun 2019, sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel III.3.9** Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1.	SP2D		
	Belanja Langsung	9.587 dokumen	-
	Belanja tidak langsung non Gaji	284 dokumen	
	Belanja tidak langsung Gaji	1.659 dokumen	
2.	SPM		
	Belanja Langsung	9.587 dokumen	-
	Belanja tidak langsung non Gaji	284 dokumen	
	Belanja tidak langsung Gaji	1.659 dokumen	

Sumber: BPKA SIPKD, tahun 2019, data diolah

Penghitungan dari data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\sum \text{KAD} &= \frac{\sum \text{SP2D}}{\sum \text{SPM}} \times 100\% \\ &= \frac{9.587 + 284 + 1.659}{9.587 + 284 + 1.659} \times 100\% \\ &= 100\% = 20\%\end{aligned}$$

Hasil penghitungan adalah 100%, artinya sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat bobot 20% tercapai.

Upaya yang dilakukan agar penatausahaan keuangan selalu akurat antara lain pencairan dilakukan dengan teliti dan cermat, komunikasi dengan OPD pengelola terus dibangun, sistem pendukung memadai, sosialisasi atas aturan pemerintah dalam teknis pelaksanaan penatausahaan keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung gaji dan non gaji khususnya dalam implementasi transaksi non tunai.



**Gambar III.4** Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah 2019 .

### 3.1.1.5. Data Dukung Capaian kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah

Data evaluasi APBD Kab/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan maupun realisasi optimalisasi kinerja BUMD dan BUKP, sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel III.3.10** evaluasi APBD, pembinaan pengelola keuangan, dan optimalisasi BUMD

No.	Uraian	Target	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5
1	Evaluasi APBD Kab / Kota			
1.1	APBD TA. 2020	5 dok.	5 dok.	50%
1.2	PAPBD TA. 2019	5 dok.	5 dok.	30%
1.3	Pertanggungjawaban APBD TA. 2018	5 dok.	5 dok.	20%
2	Pembinaan Pengelolaan keuangan			
2.1	Penetapan bendahara /KPA 2019	10 dok.	10 dok.	80%
2.2	Penetapan pengelolaan keuangan daerah	6 dok.	6 dok.	20%
3	Optimalisasi kinerja BUMD			
3.1	Deviden BUMD	Rp80.408.690.667,00	Rp80.408.690.667,00	50%
3.2	Deviden BUKP	Rp 4.591.887.256,00	Rp 5.328.468.683,00	50%

*Sumber: BPKA DIY tahun 2019, data diolah*

Dari data diatas, perhitungan akumulasi bobot komponen evaluasi APBD ( $\Sigma$ EAP) rata-rata bobot 100% (33,33%), akumulasi bobot komponen pembinaan pengelolaan keuangan ( $\Sigma$ EAK) adalah 100% (33,33%), akumulasi bobot komponen optimalisasi kinerja BUMD ( $\Sigma$ EAD) 100% (33,34%). Hasil penghitungan sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \Sigma \text{PKD} &= \Sigma \text{EAP} + \Sigma \text{EAK} + \Sigma \text{EAD} \\
 &= 33,33\% + 33,33\% + 33,34\% \\
 &= 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh hasil 100%, bobot 20% tercapai.

Agar kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah selalu konsisten upaya yang dilakukan yaitu mempedomani peraturan perundangan yang berlaku dalam melakukan evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota, responsif dalam menindaklanjuti amanat perundang-undangan, komunikasi dan koordinasi terus dibangun dengan mitra kerja baik OPD, Pemda Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah serta pembinaan yang intensif atas BUMD dan BUKP.



Gambar III.5 Evaluasi APBD, Motivasi BUKP.

### 3.1.2. Sasaran 2 : Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Kinerja sasaran sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III.3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Optimalisasi aset - aset Pemda DIY	<u>Indikator:</u> Optimalisasi aset aset pengelola barang milik daerah	<u>Meta Indikator:</u> Nilai proyeksi aset pengelola

Sumber data dihitung dari penghitungan nilai rupiah realisasi atas proyeksi aset-aset yang dirumuskan sebagai berikut:

$$OAP = \sum ORD + \sum OTP + \sum ODS$$

**Keterangan:**

- OAP = Optimalisasi aset
- $\sum ORD$  = retribusi sewa rumah dinas
- $\sum OTP$  = sewa tanah dan bangunan
- $\sum ODS$  = denda atas keterlambatan

Hasil penghitungan optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah diperoleh capaian sebagai berikut.

**Tabel III.3.12** Pengukuran Capaian Sasaran 2

NO	Indikator	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
1	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	7.107.452.565,00	114%

Kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY dengan indikator Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel III. 3.13** Target dan Realisasi Kinerja sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Optimalisasi aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah	6.505.543.500,-	6.234.617.858,-	7.107.452.565,-	114	6.967.568.518,-	102,01

### 3.1.2.1. Data dukung capaian nilai proyeksi aset pengelola Barang Milik Daerah

Data proyeksi dan realisasi optimalisasi aset pada pengelola barang milik daerah sebagai tersebut pada tabel di bawah.

**Tabel III.3.14** nilai proyeksi dan realisasi optimalisasi aset tahun 2019

No.	Uraian	Nilai	
		Proyeksi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Sewa Rumah Dinas	128.116.800,00	134.339.000,00
2.	Sewa tanah dan bangunan	6.106.501.058,00	6.968.342.275,00
3.	Denda	-	4.771.290,00
	Jumlah( $\Sigma$ )	6.234.617.85800-	7.107.452.565,00

Sumber: Laporan keuangan akhir tahun Pemda DIY TA.2019 un audited, data diolah.

Penghitungan nilai rupiah realisasi atas proyeksi aset-aset pengelola barang milik daerah didasarkan pada data realisasi yang diperoleh melalui laporan keuangan

akhir tahun Pemda DIY TA.2019 un audited dengan cara menjumlahkan realisasi retribusi sewa rumah dinas, sewa tanah dan bangunan, dan denda atas keterlambatan sewa, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$OAP = \sum ORD + \sum OTP + \sum ODS$$

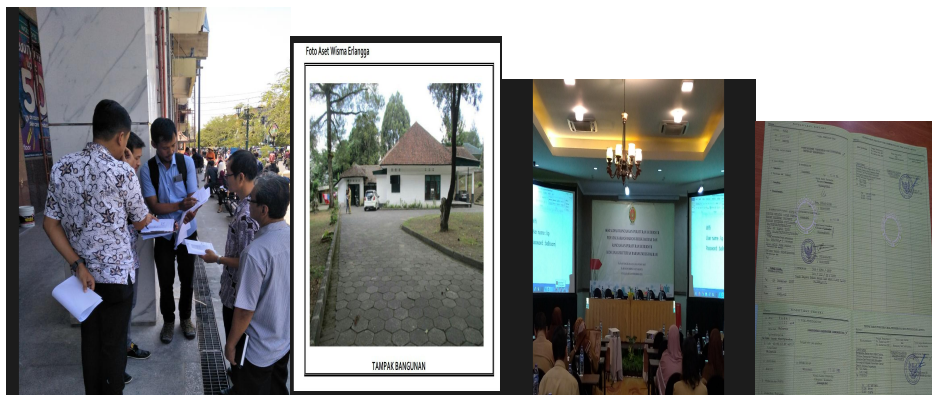
**Keterangan:**

- OAP = Optimalisasi aset
- $\sum ORD$  = retribusi sewa rumah dinas
- $\sum OTP$  = sewa tanah dan bangunan
- $\sum ODS$  = denda atas keterlambatan

Hasil penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} OAP &= \sum ORD + \sum OTP + \sum ODS \\ &= \text{Rp}34.339.000,- + \text{Rp}6.968.342.275,- + \text{Rp}4.771.190,- \\ &= \text{Rp}7.107.452.565,- \end{aligned}$$

Agar realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah dapat tercapai sesuai target, upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan identifikasi aset-aset *idle* pada pengguna/kuasa pengguna barang, sehingga aset-aset *idle* dapat dilakukan kajian agar kegunaannya lebih maksimal.



**Gambar 3.6** Optimalisasi Aset Daerah 2019

### 3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

#### 3.2.1 Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

- ✓ Tercapai 100%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target 100%, maka target tahun 2019 tercapai.
- ✓ Dibandingkan realisasi tahun lalu (2018) terdapat kenaikan/penurunan 0% (karena target maksimal adalah 100%)
- ✓ Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.
- ✓ Keberhasilan pencapaian sasaran 1 disebabkan oleh adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, sistem layanan aplikatif dan mudah terjangkau, penyesuaian regulasi baru, responsif atas temuan / rekomendasi aparat pengawasan.

#### 3.2.2 Sasaran 2 : Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

- ✓ Tercapai Rp7.107.452.565,00 dari target (proyeksi) Rp6.234.617.858,00, dengan demikian persentase realisasi terhadap target = 114%, maka target tahun 2019 tercapai.
- ✓ Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2018) sebesar Rp6.505.543.500,00 capaian kinerjanya 109,25%.
- ✓ Sedang realisasi capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar Rp6.967.568.518,00, capaian kinerjanya telah tercapai pada tahun 2019 (melebihi target 2, 01%.)
- ✓ Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan adanya konsistensi penerapan peraturan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah, kerjasama dengan jasa penilai publik untuk diperoleh nilai wajar sewa dan perubahan subyek sewa rumah dinas.

### 3.3. Realisasi Anggaran

**Tabel III.3.15** Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100 %	100 %	100	22.548.228.020	21.143.332.410	93,77
2	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	6.234.617.858	7.107.452.565	114	4.851.170.357	4.501.172.161,99	92,79
<b>Jumlah</b>						<b>27.399.398.377</b>	<b>25.644.504.571</b>	<b>93,60</b>
Program pendukung						24.820.741.490	22.651.325.170	91,26
Total Belanja Langsung						52.220.139.867	48.295.829.741	92,49

Berdasarkan tabel III.3.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp27.399.398.377,00, terealisasi Rp25.644.504.571,00 atau 93,60%. Sisa anggaran sebesar Rp1.754.893.806,00 atau 6,40% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi honorarium dan belanja perjalanan dinas narasumber pusat yang tidak bisa hadir pada saat acara sosialisasi;
- Efisiensi honorarium harian non PNS sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 903/3398 tanggal 20 Maret 2019 bahwa PNS tidak boleh menerima honor;
- Sisa belanja perjalanan dinas luar daerah (at cost).

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 100%, dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp1.754.893.806,77(6,40%)



# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran dengan 2 indikator kinerja utama, pada tahun 2019, dari 2 indikator tersebut seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan 100%.
2. Kendala, hambatan permasalahan kinerja yang dihadapi untuk mencapai sasaran antara lain:
  - a. Informasi layanan pembayaran pajak belum terinformasikan ke seluruh wajib pajak.
  - b. Informasi layanan obyek-obyek retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah belum seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
  - c. Dalam penyusunan APBD TA 2020 yang tepat waktu dan akurat adalah penyusunan kelengkapan DPRD DIY periode Tahun 2019-2023 yang waktunya bertepatan dengan jadwal penyusunan APBD TA 2020, sehingga walaupun RAPBD DIY disampaikan ke DPRD tepat waktu yaitu 10 September 2019, penjadwalan untuk diantarkan dalam rapat paripurna mundur hingga alat kelengkapan dewan terbentuk.
  - d. Aset-aset *idle* belum seluruhnya teridentifikasi terutama aset-aset yang terdapat pada pengguna dan atau kuasa pengguna barang.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan dirumuskan dalam Rencana Aksi dan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi secara lebih intens kepada wajib pajak di seluruh wilayah DIY
- b) Pemasangan spanduk di tempat-tempat layanan yang menampilkan tarif dan dasar hukum pemungutan retribusi

- c) Adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam penyusunan APBD TA 2021, maka untuk tahap awal perlu ada sosialisai terkait PP.12 Tahun 2019 dan Permendagri 90 tahun 2019 kepada TAPD agar ada pemahaman bersama, mapping kode-kode rekening lama ke yang baru dan sosialisasi pedoman penyusunan APBD TA 2021 kepada para Pengguna Anggaran.
  
- d) Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi aset-aset *idle*, melaksanakan *road map* pemanfaatan BMD dan kajian terhadap aset-aset idle untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi (*Highest Best Use-HBU*) sebelum dilaksanakan pemanfaatan barang milik daerah.

# LAMP IRAN

*Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)*

**Visi** : *Terwujudnya peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*

**Misi** : *1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis*

**Tupoksi** : *melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan barang daerah*

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Ket
					TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas pengelola keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	%	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



**jogja**  
istimewa

**Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Istimewa Yogyakarta**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2019

PIHAK KEDUA  
Gubernur  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA



BPKA  
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO  
NIP. 195010031988031008

**PERJANJIAN KINERJA**

Setuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY  
 Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	persen	100	Triwulan I	17,00
					Triwulan II	50,00
					Triwulan III	72,00
					Triwulan IV	100,00
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	6.234.617.858,83	Triwulan I	187.038.535,00
					Triwulan II	3.740.770.716,00
					Triwulan III	4.987.694.287,00
					Triwulan IV	6.234.617.858,83

Jumlah Anggaran : Rp50.197.076.367,00

**Keterangan**

- |  |                     |                           |                     |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah   | Rp 3.173.473.000,00 | Anggaran APBD             | Rp50.197.076.367,00 |
| 2. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah                                  | Rp 2.173.324.000,00 | Anggaran Dekonsentrasi TP | Rp                  |
| 3. Program Penatausahaan Keuangan Daerah   | Rp 872.945.000,00   |                           |                     |
| 4. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah   | Rp 1.957.448.500,00 |                           |                     |
| 5. Program Peningkatan Pendapatan KPPD   | Rp 9.113.641.520,00 |                           |                     |
| 6. Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah   | Rp 4.197.670.000,00 |                           |                     |
| 7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Rp 3.073.195.607,00 |                           |                     |
| 8. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah   | Rp 1.734.174.750,00 |                           |                     |
| 9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Rp10.396.078.470,00 |                           |                     |
| 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Rp13.172.221.520,00 |                           |                     |
| 11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan | Rp 378.906.000,00   |                           |                     |

Yogyakarta, Januari 2019



Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
INSPEKTORAT**

Kompleks Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman  
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512587

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id)

Yogyakarta, 06 - 05 - 2015

Nomor : 700 / 01355

Kepada

Lampiran :

Yth. Gubernur

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem  
AKIP Tahun 2018 pada Dinas  
Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

di

Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, maka diindikasikan dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 115/01/INS/2015 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2018 untuk seluruh SKPD. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
    - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
    - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan



Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Pencapaian Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
    - 1) Pemanuhan Pengukuran;
    - 2) Kualitas Pengukuran;
    - 3) Implementasi Pengukuran.
  - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
    - 1) Pemanuhan Pelaporan;
    - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
    - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
  - d. Evaluasi Internal meliputi:
    - 1) Pemanuhan Evaluasi;
    - 2) Kualitas Evaluasi;
    - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
    - 1) Kinerja yang Dilaporkan (Output);
    - 2) Kinerja yang Dilaporkan (Outcome);
    - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
    - 4) Kinerja dan Perhatian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai sebesar 86,78 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel!
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,93 atau 89,77% dari bobot sebesar 30%;
  - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,08 atau 88,33% dari bobot sebesar 25%;
  - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,27 atau 88,44% dari bobot sebesar 15%;
  - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,25 atau 82,50% dari bobot sebesar 10%;
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 16,25 atau 81,25% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektoriat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKOP Tahun 2017, sudah dilakukan perbaikan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4 di atas, direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh Jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya memperhatikan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja khususnya pada Aspek Evaluasi Internal dan Aspek Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

INSPEKTUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



W. S. SANTOSO, SE., M.Acc. <sup>1</sup>/<sub>1</sub>

19680215 199403 1 005

Tembusan :  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

**Lampiran 4 : Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613  
Yogyakarta 55213**

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA (2018)**

OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Perihal	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01335, tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP Tahun 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	Rekomendasi: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya:  1. mempertahankan kinerja yang telah dicapai.  2. berupaya meningkatkan kinerja khususnya pada aspek evaluasi internal dan aspek pencapaian sasaran / kinerja organisasi.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya telah melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut:  1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk pertemuan Senin pagi maupun pembinaan rutin kepegawaian yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali;  2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan dengan menyusun aplikasi capaian kinerja;

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Drs Bambang Wisnu Handoyo  
NIP.19601003 198803 1 006

## Lampiran 5 : Profil Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Nama Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala	1	S.2/S.1	1	S.1	v	
2.	Sekretaris	1	S2, S1	1	S.2		v
3.	Kepala Bidang Pendapatan	1	S.2/S.1	1	S.1	v	
4.	Kepala Bidang Anggaran Belanja	1	S.2/S.1	1	S.1		v
5.	Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah	1	S.2/S.1	0	-	-	-
6.	Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah	1	S2/S.1	1	S.2		v
7.	Kepala Bidang Akuntansi	1	S.2/S.1	1	S.2		v
8.	Kepala Bidang Pengelola BMD	1	S.2/S.1	1	S.1	v	-
9.	Kepala UPTD	5	S.1	5	S2	v	v
10.	Kasubagian Umum	1	S.1	1	1	v	
11.	Kasubag Keuangan	1	S.1	0	-	-	-
12.	Kasubag Program	1	S.1	1	1		v
9.	Kasubid Pajak	1	S2, S1	1	S2		v
10.	Kasubid Retribusi	1	S2, S1	1	S1		v
11.	Kasubid Pendapatan Lain-Lain	1	S2, S1	1	S2	v	
12.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Pemerintahan	1	S2, S1	1	S2	v	
13.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Perekonomian	1	S2, S1	1	S2	-	v
14.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Sarana dan Prasarana	1	S2, S1	1	S1	-	v
15.	Kasubid Anggaran Belanja Sektor Sosbud	1	S2, S1	1	Sarjana Muda	v	-
16.	Kasubdid Akuntansi Sektor Pemerintahan	1	S2, S1	1	S2	v	-
17.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Perekonomian	1	S2, S1	1	S2		v
18.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sarana dan Prasarana	1	S2, S1	1	S1	v	
19.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sosbud	1	S2, S1	1	S2		v
20.	Kasubdid Akuntansi Sektor Pemerintahan	1	S2, S1	1	S2	-	v
21.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Perekonomian	1	S2, S1	1	S1		v
22.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sarana dan Prasarana	1	S2, S1	1	S1	-	-
23.	Kasubid Akuntansi Belanja Sektor Sosbud	1	S2, S1	1	S1		v
24.	Kasubid Pengelolaan Barang Daerah	1	S2, S1	1	S1	v	-
25.	Kasubid Pendayagunaan Barang Daerah	1	S2, S1	-	S1	-	-
26.	Kasubid Monitoring dan Evaluasi	1	S2, S1	1	S1	v	-

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Kasubid Bina APBD	1	S2, S1	1	S1	√	√
28.	Kasubid Bina BUMD dan BUKP	1	S2, S1	1	S2	√	-
29.	Kasubid Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	1	S2, S1	1	S1	√	-
30.	Kasubag Umum	1	S2, S1	1	S1	√	-
31.	Kasubag Keuangan	1	S2, S1	-	-	-	-
32.	Kasubag Program dan Data TI	1	S2, S1	1	S1	-	√
B	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
C.	Jabatan Pelaksana Substantif						
33.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	9	S2, S1	8	S2, S1, SLTA	√√√√√	√√
34.	Analisis Pajak	4	S.1	2	S.1	√	√
35.	Analisis Retribusi	4	S.1	3	S.1	√	√√
36.	Analisis Pendapatan Daerah	4	S.1	3	S.1, SLTA	√	√√
37.	Analisis Perencanaan Anggaran	12	S.1	15	S.1,SLTA	√√√√√√√	√√√√√
38.	Pengelola Perbendaharaan	12	S.1	13	S.2, S.1 SLTA	√√√√	√√√√√
39.	Analisis Pengelolaan Keuangan	8	S.1, D.4	4	S.1, SLTA	√√	√
40.	Pengevaluasi Perkembangan BUMD	2	S.2	2	S.2	√√	-
41.	Penyusun Laporan Keuangan	12	S.1	9	S.2, S.1, D.3, SLTA	√√√√√	√√√
42.	Analisis Pengelola Kekayaan Daerah	12	S.1	15	S.2, S.1,SLTA	√√√√√√√	√√√√√
43.	Verifikator Pajak	47	S.1	22	S,2, S.1,SLTA	√√√√√√√√√	√√√√√√√√√
D.	Jabatan Pelaksana Administratif						
44.	Bendahara	14	S.1	15	S.1,S1,SLTA	√√√√√√√	√√√√√
45.	Verifikator Data Laporan Keuangan	7	D.3	2	S1	√	√
46.	Pengelola Akuntansi	7	D.3	3	SLTA	√	√√
47.	Pengelola Barang Milik Negara	12	D.3	7	S.1,D.3,SLTA	√√√√√	√
48.	Pengelola Gaji	6	D.3	1	S1	√	
49.	Pengadministrasi Keuangan	11	D.3	2	SLTA	-	√√
50.	Pengadministrasi Kepegawaian	7	D.3	6	S.1,D.3,SLTA	√√√	√√
51.	Pengadministrasi Pajak	46	D.3	6	S1, SLTA	√√√	√√
52.	Pengadministrasi Umum	8	D.3	6	D.3, SLTA	√√√	√√
53.	Pengadministrasi Persuratan	6	D.3	3	S.1, SLTA	√√	√
54.	Pranata Kearsipan	9	D.3	3	S.1, D3	√√	√
55.	Teknisi Sarpras	6	D.3	2	SLTP	√√	-
56.	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	S.1	1	S.1	√	√√
57.	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	44	D.3	14	S.1,D.4,SLTA	√√√√√√√√	√√√√
58.	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	17	D.3	8	S.1	√√√	√√√
59.	Pengelola Data Wajib Pajak / Retribusi	23	D.3	13	S.1,D.3,SLTA	√√√√√√√√	√√√
60.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	15	S.1	7	S.2,S.1,SLTA	√√√	√√√
61.	Pengemudi	5	SMK/SMA	2	SMP	√√	-
	<b>Jumlah</b>	<b>423</b>		<b>244</b>		<b>148</b>	<b>96</b>

